

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*. Toga Pers. Yogyakarta.
- Abdy Yuhana. 2013. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan undang-undang dasar 1945*. Fokus Media. Bandung.
- Abdul Khakim. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Aditya Bakti. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- _____. 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar.
- Amzullian Rifai. 1998. *Pemilihan Umum Di Australia*. Penerbit Unsri. Palembang.
- C.S.T. Kansil. Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale (Pemilu, Klientelisme, Dan Negara DI Indonesia)*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- _____. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenamedia Grup. Jakarta.

- _____. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana Prenamedia Grup. Jakarta.
- _____. 2020. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Kencana Prenamedia Grup. Jakarta.
- Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan. 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- F. Isjawara. 1999. *Pengantar Ilmu Politik*. Putra Bardin. Jakarta.
- Ibramsyah Amiruddin. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum*. Author. Stockholm.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- _____. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- KPU. 2019. *Panduan KPPS. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019*. Author. Jakarta.
- Lukman Santoso AZ. Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*. Setara Press. Malang.
- Muhadam Labolo. Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. PT Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Muh. Hasrul dan H. Syafa'at Anugrah Pradana. 2017. *Urgensi staf ahli kepala daerah*. Litera. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Penguatan Lembaga Negara Dalam Konstitusi)*. Litera. Yogyakarta.

- Muhammad Tahir Azhari. 2010. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya di lihat dari Segi Hukum Islam)*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Musa, Ali Masykur. 1953. *Pemilihan Presiden Langsung*. Sinar Harapan. 30 Phisic. McGraw Hill. New York.
- Ni`matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Parningotan Malau. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*. Sofmedia. Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo Persada. Jakarta.
- Surbakti dan Karim. 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publising. Bekasi.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrial Syarbaini dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 51 tahun 2018 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum.

Surat Kementerian Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

JURNAL ILMIAH

Andreas Pandiangan. 2019. "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja". *The Journal of Society & Media*, Volume 3.

Bernard Grofman, 2005, *Thinking About the Political Impacts of the Electoral College*, Public Choice 123.

Burhanuddin Muhtadi, 2013, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien*, Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 10 No. 1.

Conie Pania Putri, Muhammad Syahri Ramadhan, 2018, *Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia)*, Jurnal thengkyang universitas Sjakhyakirti, Palembang.

Doris Febriyanti, M. Jerry Pratama, 2017, *Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 2 No.1.

Faisal Adhyaksa, 2020, *Pertanggungjawaban pemerintah terhadap KPPS sebagai Penyelenggara pemilu*. Jurnal Cakrawala Hukum, Surabaya.

H. M. Thalha. 2009. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 16 Nomor 3.

Idul Rishan, Duka Pemilu, Harian Analisis Kedaulatan Rakyat, Tanggal 14 Mei 2019.

Kasman Abdulah, "*Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Konsep Good Governance*", Jurnal Meritokrasi, Edisi 2002.

_____, "*Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa*", Jurnal Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial, Edisi February 2017.

Pan Mohammad Faiz, "*E-Voting Untuk Pemilu Presiden*," Majalah Konstitusi, Edisi April 2019.

Robby A.M. Manoppo, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu*, Jurnal KPU. Bidang Evaluasi kelembagaan pemilu.

Riki Rahmad, Khairul Fahmi, 2019, *Rekonstruksi Pembagian Tugas Dan Wewenang Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019*, Jurnal Jurisprudence Vol. 9, No. 2.

Kornelius Benuf. 2019. "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019". *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* Volume 6, Edisi II.

Muhammad Nur Ismanu, 2019, *Problematika Rekrutment Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Penelitian Politik, Universitas Indonesia, Vol. 02, No. 02, Desember.

Pippa Norris, 2012, *Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions* , (HKS Faculty Research Working Paper Series

RWP12-010, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, hlm.8. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8506826/RWP12010_Norris.pdf?sequence=1&isAllowed=y Diakses Tanggal 13 Juli 2020.

WEBSITE

Kematiankpps. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit?page=all>. Diakses tanggal 9 Februari 2020.

Sejarah KPU. <http://ppid.kpu.go.id/?download=20160831082552>. Diakses pada 5 February 2020.

klikpositif.com. (2019). Bawaslu Sebut Puluhan TPS Berpotensi PSU di Sumbar. Retrieved from <http://news.klikpositif.com/baca/49569/bawaslu-sebut-puluhan-tps-berpotensi-psu-di-sumbar>

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. *Chandra Iswinarno, Ini Durasi Pencoblosan di TPS Pemilu 2019 Versi KPU*. 13 Maret 2019, Suara.com. Dalam <https://www.suara.com/news/2019/03/12/120048/ini-durasi-pencoblosan-di-tps-pemilu-2019-versi-kpu>, diakses 20 Juni 2020.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 846 /HM.03.4-KT/7371/KPU-Kot/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : HAMKA HAMDARIS
Nomor Pokok : B11116037
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
Alamat : MAKASSAR
Judul : TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM
TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA .

Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum An. Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan Nomor : 248/UN4.5.3/PT.00/2020 tanggal 18 Maret 2020, Hal Penelitian bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Agustus 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Ketua**

M. FARIDL WAJDI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email: fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 520 /RB-FH/I/2018

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

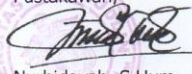
Nama : Hamka Hamdaris
NIM : B11116037
PRODI : S1-LMU HUKUM
Departemen : S1-Hukum Tata Negara
Alamat : Makassar

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26/June/2020
Pustakawan,


Nurhidayah, S.Hum., M.M.
Nip. 196508061990032009





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
GEDUNG PERPUSTAKAAN LANTAI 2 DAN 3
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN

Nomor: 13624/UN4.38.1.1/PT.01.04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim, S.Sos
NIP : 197012021993031002
Pangkat/Gol : Penata (Gol. III/c)
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
Unit Kerja : UPT Perpustakaan Unhas

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HAMKA HAMDARIS
Nomor Pokok : B11116037
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : Makassar

benar telah melakukan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul:

**“TANGGUNGJAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA”**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Juli 2020



Kasubag Tata Usaha ,

Hasyim, S.Sos
NIP. 197012021993031002

